



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dominannya peran kyai dalam sistem sosial pada masyarakat Indonesia membuat posisi para kyai sangat penting sehingga masyarakat sering menjadikan kyai sebagai rujukan dalam masalah kehidupan sehari-hari seperti urusan ibadah, pekerjaan, urusan rumah tangga bahkan urusan politik¹. Di Indonesia yang kebanyakan menganut agama Islam kyai merupakan salah satu prioritas utama yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat tersebut. Kyai sebagai salah satu tokoh strategis dalam masyarakat karena ketokohnya sebagai figur yang mempunyai pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran agama Islam².

Kharisma yang dimiliki oleh para kyai menyebabkan mereka menduduki posisi kepemimpinan dalam lingkungannya. Selain sebagai pemimpin agama dan pemimpin masyarakat desa (bahkan nasional), kyai juga memimpin pondok pesantren tempat ia tinggal, perkataan seorang

¹ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran Politik Radikal Dan Akomodatif* (Jakarta: LP3eS, 2004), 37.

² Ibid., 43.



kyai biasanya tidaklah dibantah, ia menjadi ikutan banyak orang, kerap kali tanpa mempersoalkan apakah dasar pendapat itu dan bagaimana nilainya³.

Sebagai elit agama, kyai mempunyai kewajiban untuk menegakkan nilai-nilai agama dengan cara *amar ma'ruf nahi munkar*. Pada saat yang sama, kyai sebagai salah satu sumber ajaran agama yang pandangan dan pemikirannya menjadi referensi. Sebagai elit sosial, kyai menjadi panutan dan sekaligus pelindung masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Dalam kaitan kyai sebagai figur yang paling terpandang di kalangan masyarakat yang menjadikan setiap perilaku dan ucapannya diikuti oleh masyarakat.

Setidaknya ada tiga perilaku substantif seorang kyai yang menjadi acuan seorang kyai dalam kepemimpinannya, di antaranya adalah: basis masa yang merupakan pola struktural sosialnya, basis ulama' yang merepresentasikan struktur kepemimpinan kyai tersebut dan basis tradisi yang secara kultural menjadi semacam sistem budaya yang mengikat keislaman dan keilmuan yang mereka anut. Kyai dan penganutnya adalah sebuah pola relasi emosional layaknya tradisi feodal tetapi tanpa struktur dan tingkatan politis seperti tradisi dalam pemerintahan kerajaan.

Oleh karena basis masa yang dengan mudah digalang oleh seorang kyai, maka kyai dianggap sebagai ujung tombak oleh para petinggi parpol peserta pemilu, perpol berlomba-lomba mendekati dan menggalang masa

³ Ainur Rofiq, "Peran Kiai Dalam Perubahan Sosial Politik Pada Masyarakat Sumber Anyar Kecamatan Mlanding Kabupaten Situbondo" (Skripsi--Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 7.



untuk mendukungnya karena fatwa yang di keluarkan oleh kyai tersebut akan selalu dianut oleh setiap santri dan masyarakat umum.

Dikalangan NU, dimana kyai dan tokoh pesantren menjadi pilar kultural utamanya sehingga muncul beberapa partai politik yang masing-masing mengklaim sebagai representasi politik organisasi ini. Masing-masing juga berupaya menempatkan beberapa kyai dan tokoh pesantren sebagai motor penggerak ataupun sekedar legitimasi. Sebagai contoh, pada saat kampanye pemilu 1977, Kyai Bisyril Syamsuri dengan kapasitasnya sebagai kyai NU dan ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP, mengeluarkan “fatwa politik”, bahwa setiap muslim diharuskan memilih PPP. Sikap radikal beliau ini dalam teori politik disebut dengan *Counters-Hegemoni*⁴. Orientasi politik Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi para kyai dari kalangan Islam tradisional, termasuk dalam kelompok *akomodisionis*. Meski demikian, dalam berpolitik, sebagian kyai NU terkadang juga menempuh strategi politik militan, tergantung dari kondisi yang dihadapi. Namun secara umum, pandangan politik kyai dan NU lebih bersifat *akomodisionis*⁵.

Mitos ulama’ harus terlibat dalam politik telah menghinggapi NU, sehingga sejak awal mula NU sudah berurusan dengan politik, keterlibatannya dalam sidang *kantoor voor inlandsche zaken* di Jakarta tahun 1929 yang membahas soal perkawinan umat dan perbaikan organisasi penghulu, bahkan pada tahun 1938 dalam muktamarnya di

⁴ Bruinessen, Van Martin. *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa* (Yogyakarta: LKIS, 1994), 105.

⁵ Effendi, Bakhtiar, *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 42.



banjarmasin NU memutuskan bahwa Indonesia adalah darul Islam (negeri muslim), dengan alasan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan Islam memiliki syariat tersendiri selain itu negara ini pernah dipimpin oleh kerajaan-kerajaan muslim.

Karir politik NU bertahan sampai jenderal Soeharto menjadi presiden 1965, posisi ulama NU sangat penting saat Achmad Syaikh di Dewan Perwakilan Rakyat GR (DPR-GR) dan Subchan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), tetapi sejak tahun 1963 ulama' NU tidak lagi menduduki peran penting⁶.

Secara umum peran dari seorang kyai adalah sebagai penuntun dan pengarah dalam segi keilmuan agama kepada masyarakat atau umat, oleh karena perannya dalam masyarakat yang sangat aktif, ini menjadi sangat rawan dalam percaturan politik, eksistensi seorang kyai dalam memobilisasi masyarakat dalam segi keilmuan sering kali dimanfaatkan oleh partai politik sebagai partner dalam kemenangan partainya, dengan alasan kyai sebagai elit agama dapat menjadi tolak ukur masa yang ada di sekitarnya. Beberapa dimensi keterlibatan kyai dalam politik dalam konteks sosial maupun ekonomi yang diperkirakan berpengaruh hingga mengakibatkan lahirnya variasi respon kyai dalam politik itu sendiri, ada yang dengan tegas menyatakan tidak mau terlibat dengan politik, ada pula yang terang-terangan mendukung salah satu partai politik dengan berbagai

⁶ Zuly Qodir, *Islam Syariah Vis-A-Vis Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 130.



macam alasan. Karena partisipasi lebih memberikan nuansa aktif dan dilakukan dengan kesengajaan⁷.

Politik yang bahasa Arabnya biasa disebut dengan istilah “*Siya>sah*” yang berarti cerdas atau bijaksana. Bisa diartikan pula kata politik berasal dari kata “*polis*” yang berarti negara kota, yang jika dikaitkan maka terdapat hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama dalam suatu negara dan dalam hubungan tersebut akan timbul suatu aturan dan kewenangan dan akhirnya mengarah pada kekuasaan. Dalam bukunya, Inu Kencana menjelaskan arti politik yang bisa disebut sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan, pemerintahan, konflik dan pembagian kata-kata yang sempurna⁸.

Politik dalam arti luas adalah suatu kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat, oleh karena itu ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat, kedudukan dan penggunaan kekuasaan dimanapun kekuasaan itu ditentukan. Sedangkan arti kekuasaan sendiri adalah kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berfikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. *Hegemoni* yang dilakukan oleh penguasa, pemimpin, Ulama’ yang ada kaitannya dalam politik merupakan langkah politik yang ditempuh dan harus di ikuti oleh pengikut atau masyarakat umum

⁷ Imam Suprayogo, *Kyai Dan Politik Membaca Citra Politik* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 44.

⁸ Inu Kencana Syafii, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 19.



dikarenakan keputusan politik merupakan keputusan yang mengikat masyarakat⁹.

Namun bagi dunia Islam, politik biasa digunakan sebagai suatu cara untuk mengatur *ummah* atau umat. Namun dari pemikir Islam itu sendiri, politik memiliki banyak pengertian yang seluruhnya mengenai bagaimana cara mengatur umat. Seperti yang disampaikan oleh Ar-Raghib Al-Ashfihani, penulis kitab *Mufradat Al-Qur'an* menyatakan bahwa politik ada dua macam. *Pertama*, politik manusia untuk manusia itu sendiri, baik menyangkut kebutuhan raganya atau kebutuhan lainnya. *Kedua*, politik manusia terhadap pihak lain, baik kepada kerabatnya ataupun kepada masyarakat secara umum¹⁰.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik merupakan kemampuan dalam mengorganisir ataupun mengatur pola interaksi sosial dalam masyarakat, termasuk mengatur hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Itulah mengapa salah satu cara yang paling ampuh dalam mengelola masyarakat ialah melalui politik dan manakala manusia yang dipercaya dalam mengatur kebijakan bermasyarakat dipilih melalui mekanisme politik, baik secara *voting* maupun secara musyawarah untuk *mufakat*.

⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 1999), 5.

¹⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama Dan Politik* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).



Dalam pembahasan ini, penulis melakukan pola implementasi politik, yakni peran seorang ulama atau kyai dalam hal ini adalah KH Abdul Ghofur yang melakukan beberapa aksi dukungan politik terhadap salah satu partai politik peserta pemilu yakni partai Gerindra yang memanfaatkan kondisi beliau yang saat ini sebagai pemangku pondok pesantren untuk memobilisasi santri dan keluarga santri bahkan masyarakat umum untuk menjatuhkan pilihan terhadap partai tersebut. Yang menurut Nanang Tahqiq diimplementasikan kepada *Amr Ma'ruf Nahi Munkar* yang rinciannya meliputi kontrol terhadap masyarakat, memecahkan problematika masyarakat dan menjadi agen perubahan masyarakat.¹¹

Bicara kepemimpinan KH Abdul Ghofur terkait kepemimpinannya maka tidak lah terlepas dari yang disebut Kekuasaan walaupun tidak serta merta kekuasaan itu diartikan sebagai arti penguasa tapi dikiaskan pada seorang pemimpin umat yang segala ucapan dan tingkah beliau adalah fatwa yang harus diikuti oleh umat atau santri-santrinya. biasanya merupakan gejala yang selalu ada dalam proses politik. Politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral karena begitu berkaitannya antara keduanya. Ada beberapa konsep yang berkaitan dengan kekuasaan yaitu :

a. *Influence* atau pengaruh, yaitu bagaimana seseorang mampu mempengaruhi agar orang lain berubah secara sukarela.

¹¹ Nanang Tahqiq, *Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 189.



- b. Manipulasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain namun yang dipengaruhi tidak menyadari.
- c. *Coersion* adalah ancaman atau paksaan agar orang lain sesuai dengan kehendak yang punya kekuasaan.
- d. *Force* yaitu tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan. Ini biasanya dilengkapi dengan senjata, sehingga orang lain mengalami ketakutan.

Dapat juga dikembangkan dalam bentuk teori *Hegemoni* yang artinya adalah kekuasaan dan dominasi yang dipegang oleh satu kelompok sosial terhadap kelompok lainnya atau kyai dan masyarakat atau santrinya.¹²

Kecenderungan menarik dukungan kyai dan tokoh-tokoh pesantren tersebut memperlihatkan bahkan nilai politik kyai dihadapan para politisi dalam upaya mereka membangun basis dukungan ataupun sekedar legitimasi bagi kepentingan politiknya masih cukup tinggi. Tetapi hal tersebut dibantah oleh KH Abdul Ghofur selaku pendiri dan pengasuh PonPes Sunan Drajat, beliau menfatwakan kepada masyarakat umum melalui media masa radio dan majalah-majalah, beliau mengatakan bahwa kita harus mendukung siapapun yang akan menjadi calon pemimpin dengan partainya asalkan dia peduli terhadap pondok pesantren dan dengan visi misi untuk kemaslahatan masyarakat secara umum dengan cara apa yang difatwakan beliau ini adalah bertujuan untuk menggalang masa dan simpati masyarakat untuk kemenangan partai Gerindra

¹² Nezar Patria, *Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 54.



khususnya desa Banjarwati kecamatan paciran dan sekitarnya, karena beliau juga termasuk kyai yang menggagas berdirinya partai tersebut dan secara struktural beliau juga masuk dalam jajaran dewan pembina dan penasehat partai tersebut.¹³

Penerima gelar Doktor Honoris Causa dari America Institut Of Management Hawaii Amerika Serikat ini memang sering *disowani* atau didekati oleh para elit politik, diantaranya adalah kedatangan calon bupati lamongan 2010 yang tidak lain adalah pernah nyantri di pondok pesantren Sunan Drajat, wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf, Megawati Soekarno Putri, mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso, dan banyak lagi menteri-mentri yang juga pernah sowan kepada beliau bahkan belum lama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga datang diakhir jabatannya sebagai presiden Indonesia sekarang, tetapi yang memang sangat rutin datang *sowan* adalah Prabowo Subianto yang memang telah mengakarkan partainya dipesantren tersebut sehingga partai tersebut menjadi pilihan politik beliau yang dengan tujuan sama untuk mensejahterakan masyarakat dengan kemenangan partai Gerindra.¹⁴

Syekh Yusuf Qordhowi mengatakan apabila kita melihat kepada peraturan seperti peraturan pemilu atau pemberian suara maka hal tersebut didalam pandangan islam adalah suatu persaksian untuk memilih sesuatu

¹³ Suara Kawan, "Gerindra Restui Prabowo Maju DiPilpres 2014", <http://suarakawan.com/2013/03/17/gerindra-restui-prabowo-maju-di-pilpres-2014/>, Di Unduh Pada Selasa, 13 Mei 2014 pukul 22.35

¹⁴ Mustaghfirin, "Prof Dr (HC) KH Abdul Ghofur, Sosok Dan Kiprahnya", <http://tebuwung85.blogspot.com/2013/02/drhc-kh-abd-ghofur-sosok-dan-kiprahnya.html>, Di Unduh Pada Selasa, 13 Mei 2014 pukul 07.11.



yang paling layak, setidaknya pandangan ini memberikan gambaran bahwa pondok pesantren Sunan Drajat khususnya KH Abdul Ghofur menginstruksikan kepada semua santri dan wali santri agar memilih partai gerindra dalam pemilu 2014 dengan alasan partai tersebut sudah dianggap menjadi partai yang paling layak untuk dipilih dengan salah satu acuannya adalah persamaan visi misi partai gerindra dan pondok pesantren Sunan Drajat yakni mengangkat masalah ekonomi kerakyatan yang selanjutnya dapat mensejahterakan masyarakat atau memberikan jaminan kepada masyarakat untuk menjadi masyarakat yang *maslahah* dalam urusan ekonomi dan yang lainnya.

Ini sejalan dengan pendapat Ibnu 'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qoyyim, bahwa *Fiqh Siyasah* adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari *mafsadah* (keburukan / kemerosotan), meskipun Rasulullah Muhammad SAW tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya secara eksplisit fungsi dan struktur dari sistem politik.

Sosialisasi politik misalnya dapat ditemukan dalam tugas pembangunan spiritual, dengan pembangunan ini norma-norma dan ajaran agama-agama termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan politik, dikembangkan melalui sistem pendidikan dan pengajaran sehingga masyarakat dapat memiliki persepsi dan budaya yang sama.¹⁵

¹⁵ Priyatno H Martokoesomo, *Spiritual Thinking* (Bandung: PT.Mizan Pustaka, cet 1, 2000).



Dengan begitu diharapkan masyarakat dapat melaksanakan peran masing-masing dalam kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara, disisi lain pula pandangan bahwa sosialisasi politik ke masyarakat disebut pula pandangan mewariskan sistem politik yang diajarkannya sehingga melahirkan cita-cita politik yang dijanjikan Allah SWT di dalam Al Qur'an di antaranya adalah terwujudnya sebuah sistem politik, berlakunya hukum Islam dan terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat yang biasanya digambarkan dalam ungkapan *baladun t}hoyyibatun wa rabbu>n ghafur*, yang memandang konsep negeri sentosa dan sejahtera¹⁶.

Pesantren kedepan tampaknya berpeluang untuk terus bergulat dengan politik, oleh karena itu perlu model politik santun dengan meminjam istilah Amien Rais, yaitu berpolitik kualitas tinggi (*high politics*) yang memiliki tiga ciri, yaitu pertama, setiap jabatan pada hakikatnya berupa amanah dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Kekuasaan betapapun kecilnya, harus dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan bersama. Kedua, setiap jabatan politik mengandung dalam dirinya pertanggung jawaban, tanggung jawab dihadapan Allah SWT. Ketiga, kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip *ukhuwah*, yaitu persaudaraan antar sesama umat

¹⁶ Abd Muim Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 298.



manusia, menghindari gaya politik *konfrontatif* yang penuh dengan konflik dan melihat pihak lain sebagai pihak yang harus dieliminasi¹⁷.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya yakni:

- a. Apa yang melatar belakangi KH Abdul Ghofur memberikan dukungannya kepada Partai Gerindra.
- b. Bagaimana kegiatan dukungan yang diberikan KH Abdul Ghofur terhadap Partai Gerindra.
- c. Apakah KH Abdul Ghofur masuk dalam struktur kepengurusan partai.
- d. Apa hubungan KH Abdul Ghofur dengan ketua umum Partai Gerindra.

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang timbul dalam penelitian yang dilakukan peneliti maka peneliti memfokuskan penelitian kepada tinjauan *fiqh Siyas>ah* terhadap peran KH Abdul Ghofur dalam memanfaatkan kepemimpinannya sebagai pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat dalam memobilisasi santri dan masyarakat dalam pemenangan Partai Gerindra di wilayah kecamatan Paciran Lamongan.

¹⁷ Amien Rais, *Hubungan Antara Politik Dan Dakwah* (Jakarta: Mujahid Press, 2004), 10.



D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan dua masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KH Abdul Ghofur dalam upaya pemenangan Partai Gerindra pada Pemilu 2014 di wilayah kecamatan Paciran Lamongan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran KH Abdul Ghofur dalam pemenangan partai Gerindra pada pemilu tahun 2014 di wilayah kecamatan Paciran Lamongan?

E. Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Bagaimana peran politik KH Abdul Ghofur dalam upaya pemenangan partai Gerindra pada pemilu tahun 2014 di wilayah kecamatan Paciran Lamongan.
2. Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran KH Abdul Ghofur dalam menghadapi pemilu 2014 di wilayah kecamatan Paciran Lamongan.



F. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

- a. Sebagai bahan tambahan pengetahuan penulis dengan berbagai wacana mengenai peran seorang kyai untuk pemenangan salah satu partai politik pada pemilu 2014.
- b. Sebagai bahan untuk membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai karya tulis yang dapat dijadikan sebagai acuan dan contoh peneliti selanjutnya.

2. Praktis

- a. Sebagai acuan oleh partai agar mempertimbangkan pengaruh dan peran seorang kyai dalam pemenangan partai mereka.
- b. Sebagai bahan wacana partai politik dalam menggandeng seorang kyai dalam partainya.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai karya ilmiah ini dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari maka penulis perlu memaparkan dan menjelaskan maksud dari judul di atas.



Fiqh Siyasah : adalah salah satu bidang keilmuan Fiqh yang membahas masalah politik ketatanegaraan yang mencakup masalah pemilu dan partai politik dalam perspektif syariah (al Intikhobah fi syariah).

Peran KH Abdul Gofur : adalah perilaku nyata dari kyai yang mencakup ide dan upaya yang di lakukan untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka mendapatkan dukungan untuk partai Gerindra pada pemilu tahun 2014 di wilayah kecamatan Paciran.

Pemilu : adalah dikembalikannya hak memilih oleh rakyat yang akan mewakili mereka untuk berbicara atas nama rakyat.

H. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, pembahasan mengenai peran kyai dalam penggalangan masa dalam pemilihan umum ataupun kepala daerah sudah pernah dilakukan di antaranya:



Muhammad Ilham¹⁸ dalam tulisannya “pemberdayaan politik santri pondok pesantren Sidosermo pada pilwali 2005 di Surabaya dalam perspektif fiqh siyasah”, yang inti dari pembahasannya adalah mengenai pemberdayaan santri oleh kyai dalam pilwali 2005 di Surabaya, karena hubungan *patron-klien* antara kyai dan santri di pondok pesantren Sidosermo.

Rhinta Prafania Fatin¹⁹ dalam skripsinya “partisipasi politik Kyai (study kasus keterlibatan kyai Demyathi Romly dari PPP ke Partai Golkar)” yang inti dari skripsinya adalah membahas mengenai peran kyai Demyathi Romly dalam meramaikan dan mengkampanyekan PPP sebagai partai yang dulu dan Partai Golkar sebagai pijakan politik yang sekarang.

Samsuri²⁰ “peran kyai dalam perpolitikan di pulau bawean (study pandangan masyarakat kecamatan sangkapura Bawean terhadap peran kyai dalam perpolitikan di pulau bawean)” yang fokus pembahasannya adalah untuk mengetahui bagaimana peran kyai dalam perpolitikan di daerah bawean dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran kyai tersebut di kecamatan sangkapura tersebut serta mendukung salah satu caleg di bawean untuk dapat duduk diperlemen dan mengangkat aspirasi

¹⁸ Mohammad Ilham, Lulusan Iain Sunan Ampel Fakultas Syariah Tahun 2008 Dengan Judul Skripsi “Pemberdayaan Politik Santri Pondok Pesantren Sidosermo Pada Pilwali 2005 Di Surabaya Dalam Perspektif Fiqh Siyasah” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

¹⁹ Rhinta Prafania Fatin, Lulusan Iain Sunan Ampel Fakultas Ushuluddin 2013 Dengan Judul “Partisipasi Politik Kiyai, Study Kasus Keterlibatan Kiyai Demyathi Romly Dari PPP Ke Partai Golkar” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

²⁰ Samsuri Lulusan IAIN Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Jinayah Tahun 2005 Dengan Judul Skripsinya “Peran Kyai Dalam Perpolitikan Di Pulau Bawean (Study Pandangan Masyarakat Kecamatan Sangkapura Bawean Terhadap Peran Kyai Dalam Perpolitikan Di Pulau Bawean)”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).



warga bawean dan memberikan arahan perpolitikan yang berlandaskan akhlakul karimah saat sidang anggota legislatif.

Adapun yang dibahas dalam penelitian yang penulis lakukan adalah tentang “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran KH. Abdul Ghofur dalam pemenangan partai Gerindra di wilayah kecamatan Paciran Lamongan” yang intinya adalah optimalisasi peranan seorang Kyai dalam upaya pemenangan partai Gerindra pada Pemilu 2014 di Kabupaten Lamongan dengan melakukan pengarahannya terhadap santri dan keluarga santri serta masyarakat umum. Kemudian penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan penulis tidak mereduksi penelitian terdahulu sehingga nilai keasliannya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

I. Metode Penelitian

Penelitian penulis yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran KH. Abdul Ghofur dalam pemenangan partai Gerindra di wilayah kecamatan Paciran Lamongan” merupakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang bersifat mendeskripsikan fenomena atau permasalahan yang ada, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung, kemudian fenomena yang ada disajikan secara apa adanya dengan jelas



dan secara gamblang tanpa ada manipulasi karena bersifat penelitian. dan tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah :

1. Data yang di kumpulkan.

- a. Mengenai peran KH. Abdul Ghofur untuk pemenangan partai Gerindra di wilayah kecamatan Paciran Lamongan.
- b. Penelitian mengarah pada peranan seorang kyai dalam pemenangan partai melalui sosialisasi ke santri dan masyarakat umum.

2. Sumber data

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulisan maka dalam hal sumber penelitian akan dibagi menjadi dua macam sumber data yaitu sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung kepada KH Abdul Ghofur mengenai perannya dalam pemenangan partai Gerindra di wilayah kecamatan Paciran Lamongan dan melakukan penelitian di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Paciran.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai dokumen dan berbagai macam literatur untuk menunjang dalam menganalisis data yang diperoleh dari sumber data primer dengan mengacu pada buku utamanya adalah buku yang berjudul Kyai Dan Politik Membaca Citra



Politik karangan Imam Suprayogo, Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syariah karangan Abdul Karim Zaidan dan Fiqh Demokrasi karangan Rapung Samuddin.

3. Tehnik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara di lakukan untuk mencari data primer dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan di jawab dengan lisan kepada KH Abdul Ghofur dan mendapatkan data mengenai peran beliau dalam pemenangan partai Gerindra di wilayah kecamatan Paciran.

b. Dokumentasi

Merupakan data penunjang data primer dengan mempelajari beberapa dokumen yang mendukung secara penuh dalam pengumpulan data.

4. Tehnik pengolahan data

Seluruh data yang terkumpul akan secara bertahap disempurnakan dan dilakukan berbagai editing yang nantinya akan menghasilkan karya ilmiah yang sempurna dalam materi pembahasan dan penulisan karya ilmiah tersebut yang selanjutnya akan dilakukan analisa terhadap hasil penelitian.

5. Tehnik analisis data



Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka analisis data yang dilakukan adalah:

1. Deskriptif Analisis

Bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang peran seorang kyai dalam pemenangan partai pada pemilu 2014, yang selanjutnya penulis akan menganalisis data dan menjabarkan bagaimana peran kyai tersebut dalam pemenangan partai Gerindra di wilayah kecamatan Paciran Lamongan.

2. Deduktif analisis

Dalam tahap ini peneliti akan menganalisis sosialisasi yang dilakukan oleh seorang Kyai dalam rangka mendukung salah satu partai perspektif Fiqh Siyash.

J. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pendahuluan yaitu pendahuluan yang merupakan langkah-langkah penelitian yang berisi tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II, Kerangka Teori dan Konsepsi Fiqh Siyash terhadap pemilu dan peran politik kyai pada pemilu tahun 2014.



Bab III, Merupakan isi dari penelitian yang berisi tentang: A. Sekilas tentang KH Abdul Ghofur yang memuat tentang biografi KH Abdul Ghofur, peran politik KH Abdul Ghofur, Afiliasi politik KH Abdul Ghofur, Fatwa politik KH Abdul Ghofur. B. Rekapitulasi Hasil pemilu se Kecamatan Paciran yang berisi tentang: Daftar Pemilih tetap (DPT) dan pengguna hak pilih, rekapitulasi di desa Banjarwati, rekapitulasi di kecamatan Paciran, dan signifikasi perolehan suara partai Gerindra antara perolehan suara antara pemilu tahun 2009-2014.

Bab IV. Merupakan suatu analisa data yang khusus menganalisa menggunakan Fiqh Siyasah terhadap peran politik KH Abdul Ghofur dalam kemenangan partai Gerindra pada pemilu tahun 2014 di wilayah kecamatan Paciran Lamongan.

Bab V, Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.